Literasi Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran

Agung Aji Purnama^{*}, Neneng Nurhasanah, Zia Firdaus Nuzula

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*purnamapertama89@gmail.com, nenengnurhasanahdr@gmail.com, ziafirdaus@unisba.ac.id

Abstract. In Indonesia, products in circulation must have halal certification, including MSME products. In terms of implementation, halal certification in Indonesia is currently still not ideal. There are many MSMEs, so far only a few have taken care of halal certificates because there are still many MSMEs who do not know the importance of halal certification, one of which is MSMEs in Banjaran District. This research aims to find out how the literacy of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees is related to the obligation of halal certification for MSMEs in Banjaran District and what is the role of the Bandung Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service in providing literacy socialization of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee towards halal certification obligations for MSMEs in Banjaran District. This research uses qualitative methods, with a normative-empirical approach. The source of data obtained for this research was obtained from interviews with MSME actors. The results of this research show that the literacy of Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees regarding the obligation of halal certification for MSMEs, especially in the culinary sector in Banjaran District, varies, some have only reached the knowledge stage, some have only reached the awareness stage and some have Sudapa is at the stage of carrying out halal certification. The role of the Bandung Regency Cooperatives and Micro Enterprises Service is as a collaborative partner with BPIPH in socializing halal certification, as a facilitator in providing information related to halal certification through publications on online media, namely the DISKOP website, providing halal companions, and facilitators through halal training programs.

Keywords: *Literacy, Halal Certification, MSMEs.*

Abstrak. Di Indonesia produk yang beredar wajib memiliki sertifikasi halal termasuk produk UMKM. Pada implementasinya sertifikasi halal di Indonesia saat ini masih belum ideal. Banyaknya pelaku UMKM, hingga saat ini masih sedikit yang mengurus sertifikat halal disebabkan masih banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya sertifikasi halal salah satunya UMKM di Kecamatan Banjaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan banjaran dan bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam memberikan sosialisai literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan normative-empiris. Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM khususnya di bidang kuliner di Kecamatan Banjaran bervariasi ada yang hanya mencapai tahap pengetahuan, ada yang baru pada tahap kesadaran dan ada juga yang sudah pada tahap melakukan sertifikasi halal. Adapun peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung ialah sebagai mitra kerja sama dengan BPIPH dalam sosialisasi sertifikasi halal, sebagai fasilitator dalam memberikan informasi terkait sertifikasi halal melalui publikasi di media online yakni website DISKOP, penyediaan pendamping halal, dan fasilitator melalui program pelatihan halal.

Kata Kunci: *Literasi, Sertifikasi Halal, UMKM.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama rahmatan lil'alamin yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Segala interaksi manusia, baik horizontal maupun vertikal terdapat dalam ajaran Islam. Di antara pelajaran utamanya adalah bidang muamalah. Salah satu yang diatur dalam muamalah adalah kehalalan dalam mengkonsumsi baik makanan atau minuman.

Di Indonesia sendiri yang mayoritas beragama Islam sudah selayaknya mendapatkan kepastian kehalalan produk yang beredar. Meski mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, namun tidak semua produk yang beredar terjamin kehalalannya. Maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa undang-undang yakni Undang-undang No. 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.[1]

Bagi Muslim, mendapatkan jaminan produk halal dari pelaku bisnis sangatlah penting dan memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam Al-Qur'an, seorang Muslim diharapkan mengonsumsi sesuatu yang halal. Hal ini terdapat di firman Allah Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 168, Al-Maidah: 1-5, Al-an'am: 121. Bagi umat Islam, makanan bukan urusan perut dan kesehatan saja selain itu juga harus halal. Baik halal pada bahan makanan sendiri, serta proses pengolahan makanan tersebut [2]

Sertifikasi halal merupakan proses penjabaran produk yang belum diketahui status kehalalannya, dimulai dari tahap perencanaan bahan Baku, pembuatan, dan penyimpanan. Jadi sertifikasi halal digunakan pada produk yang bias kehalalannya belum pasti atau harus dibuktikan. Tujuan sertifikasi halal ialah guna membangun kepercayaan terhadap status kehalalan suatu produk sebagai sarana perlindungan hak konsumen. Kepercayaan konsumen terhadap status kehalalan suatu barang mempengaruhi jumlah pembelian yang dilakukan konsumen. [3]

Setelah adanya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP no. 31 Tahun 2019 tentang JPH terdapat usulan perubahan yakni yang awalnya sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) 17 Oktober 2019. Termasuk UMKM wajib melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Pada implementasinya sertifikasi halal di Indonesia saat masih belum ideal. Karena masih banyak pelaku usaha UMKM, hingga saat ini masih sedikit yang mengurus sertifikat halal disebabkan masih banyak UMKM yang belum mengetahui pentingnya sertifikat halal dan kurangnya pemahaman terhadap sertifikasi halal. Ditambah lagi, kesadaran pelaku UMKM untuk melengkapi sertifikat halal sangat rendah karena kurangnya literasi tentang pentingnya UU JPH (Jaminan Produk Halal).

Setelah adanya UU No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP no. 31 Tahun 2019 tentang JPH terdapat usulan perubahan yakni yang awalnya sertifikasi halal dari bersifat sukarela (voluntary) menjadi wajib (mandatory) 17 Oktober 2019. Termasuk UMKM wajib melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ialah suatu bentuk usaha produktif yang terdiri dari perseorangan atau badan usaha yang sering beroperasi dalam suatu lingkungan kegiatan usaha dengan berbagai karakteristik. UMKM memegang peranan penting dalam ekonomi, yang mempunyai kedudukan, serta peranan yang penting dalam mewujudkan pembangunan nasional. [4]

Kecamatan banjaran merupakan Kecamatan yang terletak di Kabupaten Bandung dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Selain itu, Kecamatan Banjaran memiliki potensi UMKM yang sangat besar dan dapat membuka peluang usaha di kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, para pelaku UMKM perlu menyadari bahwa sertifikasi halal merupakan suatu keharusan bagi mereka, atau mereka perlu meningkatkan kesadaran akan isu-isu halal

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran?”, “Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam memberikan sosialisasi literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran?” Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui bagaimana literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam memberikan sosialisasi literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mempergunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yang akan menggabungkan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yaitu UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang dikaitkan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Jenis penelitian yang dipergunakan ialah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data di penelitian kualitatif tidak berupa angka tapi kata verbal. [5] Sehingga menghasilkan data deskriptif yang menjelaskan data pelaku UMKM yang menjadi subjek penelitian. Di penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimana literasi para pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran mengenai Undang-undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Sumber data yang digunakan adalah *Pertama* Sumber data primer adalah sumber dari mana peneliti mengumpulkan dan memproses data langsung dari sumbernya, tanpa menggunakan pihak ketiga sebagai perantara. Di penelitian ini yang menjadi data primer berupa hasil wawancara para pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran. Kedua data sekunder pada penelitian ini bersumber dari UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal, Pasal 48 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau bahan pustaka yang dirujuk berupa artikel, buku, jurnal maupun website yang berhubungan dengan penelitian. Ketiga Data tersier yang dipergunakan dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum maupun Ensiklopedia terkait dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer observasi dan wawancara. Observasi yang dilaksanakan terhadap para pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran dari segi keadaan tempat, pelayanan dan juga penyajian produk. Secara garis besar pertanyaan yang diajukan untuk wawancara yaitu mengenai pengetahuan pelaku usaha UMKM di Kecamatan Banjaran terkait UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk halal terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Analisis data di penelitian ini mempergunakan metode analisis kualitatif. Proses menganalisis, mendeskripsikan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi, dan data dari wawancara atau observasi terhadap permasalahan yang diteliti di lapangan dikenal dengan metode analisis kualitatif. Dalam hal ini mendeskripsikan bagaimana kondisi yang terjadi mengenai literasi UU JPH para pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran terhadap kewajiban sertifikasi halal.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku Umkm di Kecamatan Banjaran.

Literasi halal dapat dicirikan sebagai kapasitas pengetahuan, kesadaran dan kemampuan masyarakat mengenai halal suatu produk, yang di dalamnya terdapat 3 indikator, khususnya kesadaran halal, bahan makanan, dan sertifikasi halal. Dari uraian diatas, patutnya masyarakat untuk memahami bahwa halal suatu produk tidak hanya terletak pada label halal, tetapi juga memahami dari segi pembuatan dan bahan yang digunakan sesuai dengan hukum Islam atau tidak adalah sesuatu yang penting. [6]

Bagi umat Islam sendiri, menyantap makanan halal merupakan komitmen untuk memenuhi perintah Allah SWT, dimana hal tersebut ada dalam beberapa firman Allah salah satunya. Yang Artinya:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu

adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168)

Dari ayat di atas Allah memerintahkan umat untuk terus bersyukur dan melarang umat untuk terpengaruh godaan setan termasuk godaan melalui makanan juga menerangkan kepada umat tentang halal dan thayib dalam menyantap makanan. Imam Ibnu Katsir mengatakan kata thayib memiliki makna yang baik dan tidak merusak tubuh dan otak manusia. [7]

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional sehingga memiliki posisi yang sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, hadirnya UMKM di tengah-tengah masyarakat dapat memperluas lapangan kerja dan memberikan penghasilan kepada masyarakat luas.

Maraknya UMKM yang membuka usaha di bidang kuliner dari yang berbentuk kaki lima sampai restoran mencerminkan beragamnya jenis usaha makanan yang ada di masyarakat. Bentuk usaha kuliner ini sebenarnya menjadi salah sumber mata pencarian bagi warga local Kecamatan Banjaran. UMKM yang ada di Kecamatan Banjaran pada dasarnya sudah tidak asing lagi dengan konsep sertifikasi halal. Hal ini dikarenakan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran umumnya beragama Islam. Kecamatan Banjaran yang merupakan wilayah mayoritas penduduknya beragama Islam tentu menjadikan aspek halal dari produk makanan yang dikonsumsi sebagai salah satu faktor yang penting. Sayangnya hal ini belum diiringi dengan literasi dan pemahaman yang mendalam dari pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal itu sendiri.

Hampir semua pelaku UMKM di Kecamatan Banjaran memeluk agama Islam. Namun, ternyata masih ada sebagian pelaku UMKM yang tidak memahami tentang sertifikasi halal. Pelaku UMKM pada dasarnya mengetahui bahwa menggunakan produk halal merupakan bagian dari kesempurnaan ibadah seorang Muslim, Karena Allah swt. Telah memerintahkan manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan dan Tayyib.

Jika dilihat hasil wawancara pelaku usaha UMKM kuliner, terlihat bahwa pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban sertifikasi halal masih kurang, sehingga dapat menjadi sulit dalam melaksanakan sertifikasi halal. Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau informasi yang tersedia dari pemerintah, lembaga terkait, minimnya akses pelaku UMKM terhadap pelatihan atau bimbingan terkait dengan sertifikasi halal, atau dapat juga kurangnya kesadaran para pelaku UMKM sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM, agar dapat memenuhi kewajiban ini dengan lebih baik.

Keseluruhan pelaku UMKM yang menjadi narasumber memahami bahwa pentingnya sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar, terutama dalam sektor makanan, untuk menjamin kehalalan produk tersebut. Hasil wawancara menunjukkan lima dari enam narasumber menyatakan tahu bahwa semua produk yang beredar harus memiliki sertifikasi halal. Pemahaman yang kuat mengenai suatu konsep dapat mempermudah penggunaan ilmu yang dipelajari. Namun, jika pemahaman terhadap suatu konsep tersebut kurang, maka dapat menyulitkan pelaksanaannya. Jika dilihat hasil wawancara pelaku usaha UMKM kuliner, terlihat bahwa pemahaman pelaku UMKM tentang kewajiban sertifikasi halal masih kurang, sehingga dapat menjadi sulit dalam melaksanakan sertifikasi halal.

Ketidaktahuan ini dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi atau informasi yang tersedia dari pemerintah, lembaga terkait, minimnya akses pelaku UMKM terhadap pelatihan atau bimbingan terkait dengan sertifikasi halal, atau dapat juga kurangnya kesadaran para pelaku UMKM sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan literasi dan pemahaman tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM, agar dapat memenuhi kewajiban ini dengan lebih baik. Dengan pengetahuan yang memadai, pelaku UMKM dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan sertifikasi halal, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produknya.

Pemahaman tentang cara dan tempat untuk mendaftarkan sertifikasi halal serta biaya yang dibutuhkan juga masih kurang di kalangan pelaku UMKM. Empat dari enam narasumber wawancara menyatakan tidak tahu mengenai tata cara dan tempat untuk membuat sertifikasi halal. Pelaku usaha yang menjadi narasumber contohnya Pak Robi meyakini bahwa ia tidak tahu tata cara, tempat, dan biaya yang dibutuhkan untuk mendaftar sertifikasi halal. Hal ini

menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang perlu diatasi melalui penyediaan informasi yang lebih jelas dan mudah diakses tentang prosedur dan biaya terkait dengan sertifikasi halal. Meskipun literasi tentang sertifikasi halal bervariasi, seluruh pelaku UMKM yang menjadi narasumber wawancara contohnya Mas Acep menyatakan bahwa sertifikasi halal sangat penting untuk usahanya. Pelaku UMKM mengakui bahwa memiliki sertifikasi halal dan bermanfaat untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan memberikan manfaat lain seperti meningkatkan daya saing di pasar.

Melihat dari hasil wawancara satu dari enam pelaku usaha UMKM yang menjadi narasumber merasa bahwa kewajiban sertifikasi halal beban tambahan bagi pelaku usaha UMKM, tidak dengan sebagian lainnya menyatakan tidak terbebani dengan kewajiban sertifikasi halal ini. Bervariasinya tahap literasi pada pelaku UMKM yang menjadi narasumber terdapat juga yang sudah mencapai tahap melaksanakan sertifikasi halal contohnya Mas Acep menyatakan bahwa usahanya telah terdaftar sertifikasi halal. Namun, terdapat pelaku UMKM yang belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya seperti Pak Hendra. Alasan yang membuat beberapa pelaku UMKM belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya, yaitu: mereka menganggap biaya yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal cukup besar, adanya keterbatasan waktu untuk mengurus proses tersebut, dan kurangnya pemahaman tentang prosedur yang harus diikuti.

Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam Memberikan Sosialisasi Literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Pelaku Umkm

Peran menurut KBBI adalah sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran juga dapat diartikan sebagai aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut.

Sedangkan sosialisasi dapat diartikan sebagai aktivitas yang ditujukan untuk memberitahukan membujuk atau mempengaruhi masyarakat untuk tetap menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan itu. Kemudian, dalam kaitannya dengan kegiatan sosialisasi yang dimaksud adalah suatu proses memberitahukan dan mempengaruhi masyarakat untuk selalu memanfaatkan jasa-jasa yang ditawarkan.

Peran yang dimaksud di sini adalah peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam memberikan sosialisasi literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku UMKM.

Sosialisasi dan pembinaan terhadap UMKM mengenai sertifikasi halal merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum pemerintah dalam memberikan literasi sehingga ketentuan tentang kewajiban sertifikasi halal dalam UUPH dapat terlaksana dengan baik dan efektif.

DISKOP Kabupaten Bandung memiliki program pelatihan halal. Program tersebut memilih pelaku usaha UMKM yang kemudian nantinya diberi pelatihan tentang halal. Selama ini juga pihak DISKOP dalam mengurus legalitas halal fasilitas dinas senantiasa bekerja sama dengan LPPOM untuk membantu bimbingan tentang fasilitas halal. Untuk melaksanakan program tersebut DISKOP mempunyai anggaran tiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya DISKOP minimal menyelenggarakan program pelatihan halal itu 2 sampai 3 kali dalam setahun.

Mengingat tahun 2024 adalah tahun semua produk wajib memiliki sertifikasi halal pihak DISKOP Kab Bandung sendiri turut andil untuk membantu mengencarkan kewajiban sertifikasi halal. beberapa langkah atau rancangan yang diupayakan oleh pihak DISKOP dalam upaya mensosialisasikan kewajiban sertifikasi halal yaitu publikasi di media online atau offline seperti website DISKOP yang mudah diakses oleh masyarakat, sosialisasi yang sering dilakukan dalam bentuk anjuran atau ajakan yang disampaikan melalui kegiatan pelatihan. Selain ada program pelatihan halal yang tadi disebutkan diatas, ada juga pendamping halal untuk pelaku usaha UMKM yang mau daftar sertifikasi halal. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung biasanya melakukan sosialisasi tentang halal dengan mendatangkan narasumber di bidang halal dan tamu undangannya para pelaku usaha UMKM. Tidak hanya pelatihan halal saja, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung juga mengadakan program Wirausaha Baru (WUB). Pada pelatihan WUB peserta mendapatkan materi terkait dasar-dasar berbisnis.

Selain pelatihan, para peserta juga mendapatkan kemudahan dalam mengurus label halal, izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Label halal, P-IRT dan HKI sangat penting karena konsumen sangat memerhatikan dan menanyakan terkait kehalalan produk yang dijual.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM khususnya di bidang kuliner di Kecamatan Banjaran bervariasi ada yang hanya mencapai tahap pengetahuan bahwa bahan dasar yang mereka gunakan tidak mengandung babi atau bahan haram lainnya, ada yang sudah pada tingkat kesadaran dan ada yang sudah melakukan sertifikasi halal. Mereka semua dapat menerima tentang adanya kewajiban sertifikasi halal namun khawatir tentang prosedur yang akan dilalui mulai dari persoalan kesempatan mengurus sertifikat halal dan biaya yang akan dikeluarkan.
2. Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bandung dalam memberikan sosialisasi literasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal ialah sebagai mitra kerja sama dengan BPJPH dalam sosialisasi sertifikasi halal, sebagai fasilitator dalam memberikan informasi terkait sertifikasi halal melalui publikasi di media online yakni website DISKOP, penyediaan pendamping halal, dan fasilitator melalui program pelatihan halal yang sesuai dengan anggaran yang ada. Selain itu, para peserta juga mendapatkan kemudahan dalam mengurus label halal, izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Label halal, P-IRT dan HKI.

Acknowledge

Yang pertama kepada Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Kemudian kepada kedua orang tua saya yang senantiasa selalu mendukung dan memberikan semangat serta do'a yang tidak pernah putus sehingga saya bisa sampai sejauh ini. Lalu kepada, Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Dr. Neneng Nurhasanah, Dra., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 yang selalu memberikan arahnya dengan sabar dalam membantu penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, dan Bapak Zia Firdaus Nuzula, S.Sy., M.E. selaku dosen pembimbing 2 yang selalu memotivasi, bersabar, dan mengarahkan dalam penyusunan dan penyelesaian Penelitian ini. Dan yang terakhir saya mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri, yang sudah berjuang mengorbankan keringat dan air mata dalam pengerjaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] H. A. Sukandar, "Ketentuan Regulasi Halal dalam Penyelenggaraan JPH di Indonesia," *Dikutip dari <https://www.halal.go.id>, diakses pada hari Kamis tanggal*, vol. 11, 2020.
- [2] M. Y. Qardhawi, *Halal dan haram dalam Islam*. Himpunan Belia Islam, 1980.
- [3] A. Ramadhani, *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. 2022.
- [4] A. Soemitra and Z. M. Nawawi, "Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM," *Jurnal EMT KITA*, vol. 6, no. 1, pp. 118–125, 2022.
- [5] M. Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.
- [6] C. Okspendri and V. F. Sanjaya, "PENGARUH LITERASI HALAL DAN RELIGIUSITAS TERHADAP MINAT PEMBELIAN PRODUK BERLABEL HALAL

STUDI PADA MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 01, pp. 58–75, 2022.

- [7] Abdullah bin Muhammad Abu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-syafi i, 2017.
- [8] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, “Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 129–136, Dec. 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.